

MEMPERKOKOH PONDASI MELALUI PENGEMBANGAN  
PRODUK DAN SEGMENT BISNIS BARU

[www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)

BANK VICTORIA SYARIAH LAPORAN TAHUNAN 2013





## DAFTAR ISI

04	Laporan Tahunan 2013
06	Memperkokoh Pondasi Melalui Pengembangan Produk Dan Segmen Bisnis Baru
08	Sekilas Bank Victoria Syariah
11	Visi, Misi Dan Nilai-nilai Perusahaan
12	Peristiwa Penting Tahun 2013
14	Prestasi Dan Penghargaan 2013
16	Pemegang Saham Bank Victoria Syariah
18	Sambutan Komisaris Utama
20	Sambutan Komisaris Direktur Utama
24	Sambutan Dewan Pengawas Syariah
26	Laporan Manajemen
34	Ikhtisar Keuangan
38	<i>Good Corporate Governance</i>
66	Struktur Organisasi
68	Profil Dewan Komisaris
70	Profil Direksi
72	Profil Dewan Pengawas Syariah
74	Pejabat Eksekutif Bank
76	Produk dan Layanan
82	Jaringan Kantor
84	Laporan Keuangan Audit



LAPORAN  
TAHUNAN 2013





## MEMPERKOKOH PONDASI MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK DAN SEGMENT BISNIS BARU

Menghadapi kompetisi antarbank yang semakin ketat, sektor perbankan dituntut untuk terus berinovasi baik dari sisi produk, layanan maupun operasional, yang berujung pada peningkatan kinerja usaha. Untuk itu, di tahun 2013 Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk memperkuat pondasi perusahaan sebagai bank ritel syariah dengan melakukan pengembangan produk dan segmen bisnis baru untuk percepatan pertumbuhan aset perusahaan.

Selaras dengan visinya “Menjadi Bank Ritel Syariah Nasional yang Tumbuh dan Berkembang Secara Sehat dan Amanah” dan sebagai kelanjutan dari masuknya Bank Victoria Syariah menjadi Bank Ritel Syariah Nasional pada tahun 2012, maka langkah selanjutnya dilaksanakan di tahun 2013 melalui pengembangan sejumlah produk pendanaan maupun pembiayaan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), komersil maupun konsumen. Hingga akhir 2013, Bank telah memiliki 8 produk pendanaan serta 5 produk pembiayaan yang semakin melengkapi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, Bank juga melakukan dukungan aspek operasional melalui:

### 1. Pengembangan kebijakan/standar operasi

Pengembangan kebijakan operasional dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang memudahkan alur pemasaran dan transaksi produk, serta memperlancar pelayanan yang berdampak pada kepuasan nasabah.

### 2. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi

Pengembangan teknologi dan informasi perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan efektivitas setiap proses kerja pada seluruh unit kerja.

### 3. Peningkatan manajemen risiko dan kepatuhan

Penerapan manajemen risiko yang baik mutlak diperlukan untuk menjadi bank yang sehat dan produktif. Melalui pengelolaan risiko yang baik, fungsi kontrol dapat lebih ditingkatkan, sehingga akan berdampak langsung terhadap tingkat daya saing Bank di pasar dan kepercayaan *stakeholders* juga akan semakin tertanam kuat.

Selain mengoptimalkan fondasi bisnis ritel yang sudah ada serta diversifikasi produk dan jasa untuk segmen bisnis baru, Bank Victoria Syariah juga berkomitmen untuk melakukan penerapan *good corporate governance* pada semua aspek.

Melalui sejumlah langkah tersebut, diharapkan di tahun mendatang, produktifitas bisnis maupun operasi akan meningkat, dan memperkuat posisi Bank Victoria Syariah sebagai bank ritel syariah Nasional.



SEKILAS BANK  
VICTORIA SYARIAH

1967

PT Bank Swaguna didirikan di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1966. Bank ini memulai kegiatan operasinya pada tanggal 7 Januari tahun 1967.

2008

Pada bulan Maret 2008, pemegang saham kembali memperkuat modal disetor bank menjadi Rp 110 miliar.

2011-2012

Entry point to be a Syariah Retail Bank.

2014

Membangun Sales Ritel dan Fokus pada Peningkatan Produktifitas

2007

PT Bank Victoria International Tbk mengakuisisi 99,98% saham Bank Swaguna dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia tanggal 3 Agustus 2007. Modal disetor bank ditingkatkan menjadi Rp 90 miliar pada bulan September 2007.

2010

Bank Swaguna dikonversi menjadi Bank Victoria Syariah. Pada tanggal 10 Februari 2010, Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin Operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah beroperasi secara penuh dengan sistem syariah mulai 1 April 2010.

2013

Memperkokoh Pondasi Melalui Pengembangan Produk dan Segmen Bisnis Baru





## MISI

- Memberikan layanan syariah terbaik kepada nasabah secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian
- Mengembangkan sumber daya insani yang memiliki dedikasi, integritas, loyalitas dan profesional
- Memperhatikan pengelolaan risiko dan keuangan secara terus menerus
- Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

## VISI

Menjadi Bank Ritel Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah

## NILAI-NILAI

H onest  
E nergic  
B rilliant  
A countable  
T rust



## PERISTIWA PENTING 2013



**07 Mei 2013**  
Peresmian Kantor Cabang Pembantu  
Diponegoro, Denpasar



**26 September 2013**  
Peresmian Kantor Cabang Solo



**01-02 November 2013**  
Pelatihan/Workshop Penilaian Jaminan  
Batch I



**10 Oktober 2013**  
Training Effective Marketing & Selling Skill



**23-24 Agustus 2013**  
Review Kinerja Semester I Tahun 2013



**08 November 2013**  
Penanda tangan PKS Developer  
dengan PT Citra Mutiara Bestari - Puri  
Dharmawangwa Villas Nusa Dua Bali.



**2013**  
Kantor Cabang Solo sebagai cabang  
dengan Pertumbuhan Pembiayaan Tertinggi



**2013**  
Kantor Cabang Utama sebagai cabang  
dengan Pertumbuhan Pendanaan Tertinggi



**15 Oktober 2013**  
Idul Qurban 10 Zulhijjah 1434 Hijriyah



**2013**  
BVIS Berbagi - Pemberian santunan kepada  
anak yatim, *driver*, *office boy* dan *security*  
pada acara buka puasa bersama Ramadhan  
1434H



# PRESTASI DAN PENGHARGAAN 2013



**Nama Penghargaan**  
*Islamic Finance Award & Cup*

**Penghargaan yang Diraih**  
*2nd Rank - The Most Profitable Islamic Full Pledge Bank*

**Tanggal Penghargaan**  
22 Februari 2013



**Nama Penghargaan**  
*Islamic Finance Award & Cup*

**Penghargaan yang Diraih**  
*3rd Rank - The Best Islamic Full Pledge Bank*

**Tanggal Penghargaan**  
22 Februari 2013



**Nama Penghargaan**  
*18th Infobank Awards*

**Penghargaan yang Diraih**  
*Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 2012*

**Tanggal Penghargaan**  
5 Juli 2013



**Nama Penghargaan**  
*Anugerah Perbankan Indonesia 2013*

**Penghargaan yang Diraih**  
*Peringkat 3 Corporate Communication*

**Tanggal Penghargaan**  
26 September 2013



**Nama Penghargaan**  
*Infobank Syariah Finance Award 2013*

**Penghargaan yang Diraih**  
*Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 2012*

**Tanggal Penghargaan**  
6 November 2013



# PEMEGANG SAHAM BANK VICTORIA SYARIAH

## PEMEGANG SAHAM BANK VICTORIA SYARIAH



- 1. PT. Bank Victoria International, Tbk: 99,98%
- 2. Masyarakat Lain: 0,02%

Pemegang Saham Akhir (*Ultimate Shareholder*) PT. Bank Victoria Syariah adalah PT. Bank Victoria International Tbk. yang dimiliki oleh:

No.	Nama Pemegang Saham	(%)
1	PT. Victoria Investama	34.72
2	Suzanna Tanojo	13.30
3	Atrium Asia Investment Management Pte Ltd	8.82
4	PT Suryayudha Investindo Cipta	6.32
5	PT. Nata Patindo	3.32
6	Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	33.52
TOTAL		100.00





# SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Pertama-tama, kami, Dewan Komisaris memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya, maka Bank Victoria Syariah dapat melalui tahun 2013 dengan perkembangan yang menggembirakan.

Walaupun mengalami tekanan dari ekonomi global, namun perekonomian Indonesia tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 5,7%, meski lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang melambat ini terlihat dari indikator tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia dan dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah.

Kondisi perekonomian nasional tersebut, tentu memberikan pengaruh terhadap perjalanan bisnis Bank Victoria Syariah. Namun demikian, Bank Victoria Syariah telah berhasil melakukan antisipasi atas tantangan yang ada dengan menunjukkan pencapaian kinerja Bank yang cukup baik.

Beberapa hal yang dapat dikemukakan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Secara umum Direksi telah menunjukkan upaya serius untuk mencapai kinerja terbaik dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan. Kinerja Bank tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan, walaupun belum mencapai target sepenuhnya.
2. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Bank telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik yang juga sesuai hasil penilaian regulator, memiliki sistem pengendalian intern yang cukup dan Satuan Kerja Audit Intern yang telah berjalan, sesuai penerapan *Risk Based Internal Audit (RBIA)*.
3. Bank telah berhasil mencapai pertumbuhan dan rasio-rasio keuangan dengan cukup baik. Kinerja Bank tahun 2013 dalam sejumlah indikator utama menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain aset Bank mencapai Rp1.350.910 juta naik sebesar 44% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp937.157 juta, dan laba bersih tercatat sebesar Rp7.055 juta. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tercatat sebesar 18,29%, Rasio Pembiayaan (*Finance*) terhadap Dana Pihak Ketiga (*FDR*) sebesar 84,65%, sedangkan Rasio Pembiayaan yang tergolong *Non Performing Finance (NPF)* kotor sebesar 3,71% tetap dalam penanganan intensif.
4. Terhadap prospek dan pengembangan usaha Bank yang disusun oleh manajemen, Dewan Komisaris berpendapat bahwa penyusunan prospek usaha tersebut telah menyesuaikan dan memperhatikan *Corporate Plan*, kondisi perekonomian ke depan, kebijakan pemerintah, dukungan Pemegang Saham, peningkatan dan penguatan organisasi, jaringan kantor, Sumber Daya Insani (SDI), manajemen risiko dan teknologi yang tersedia. Direksi beserta jajarannya mampu mengembangkan peluang bisnis untuk mencapai target rencana bisnis yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja cukup baik.
5. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, kami senantiasa memberikan saran dan masukan kepada pihak manajemen (Direksi), sebagai fungsi pengawasan terhadap operasional Bank. Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sejalan dengan tugasnya, komite-komite tersebut juga melaksanakan interaksi secara rutin dengan manajemen dan satuan kerja terkait yang semuanya bertujuan agar *Good Corporate Governance (GCG)* dapat berjalan dengan baik.

Kinerja yang cukup baik selama tahun 2013, merupakan hasil jerih payah dan dedikasi dari seluruh karyawan dan manajemen Bank. Pada kesempatan ini Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh karyawan dan manajemen Bank, Pemegang Saham, Nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan kepada Bank Victoria Syariah selama ini. Semoga di tahun 2014 Bank Victoria Syariah dapat lebih berkembang sesuai dengan harapan kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Atas Nama Dewan Komisaris

**Pangulu Oloan Simorangkir, MM**  
**Komisaris Utama**



**PANGULU OLOAN SIMORANGKIR**

Komisaris Utama/  
Komisaris Independen



# SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi uswatun hasanah (teladan yang baik), Nabi Muhammad *Sholallahu 'Alaihi Wassalam*, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir jaman. Semoga kita bisa mengambil teladan yang baik dari beliau dalam setiap aktivitas kita.

Bank Victoria Syariah yang baru memasuki tahun ke-4 usianya, jika diibaratkan sebagai era tumbuh kembang balita, maka pada masa ini adalah saat-saat yang sangat penting dalam memperkuat fondasi di setiap lini aktivitas bank, baik bisnis bank maupun aspek operasionalnya serta terus meningkatkan kualitas serta produktivitas sumber daya insani. Dengan kokohnya fondasi bank, diharapkan ke depannya bank akan tumbuh secara sehat serta menjadi bank yang dapat memenuhi kebutuhan para nasabahnya.

Sepanjang 2013, pencapaian kinerja bank yang merupakan hasil konversi dari Bank Swaguna ini patut disyukuri, mengingat kondisi perekonomian global maupun domestik masih diselimuti krisis dan ketidakpastian, namun kami berhasil memperkuat fondasi di semua lini kegiatan usaha. Penguatan fondasi tersebut, harus dilakukan sementara bisnis bank juga harus berkembang secara *sustainable* dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan senantiasa sesuai prinsip syariah di setiap aktivitas usaha bank. Pada tahun 2013, bank telah berhasil memperkuat fondasi bisnis utama bank, peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Insani (SDI) dan pengelolaan operasional yang semakin efektif, serta penerapan manajemen risiko dan kepatuhan yang semakin kuat.

Pengembangan segmentasi bisnis yang telah dilakukan pada tahun 2013 terbukti telah memberikan kontribusi kinerja bank secara baik. Portofolio pembiayaan yang disalurkan bank mencapai Rp 859.9 Miliar meningkat signifikan sebesar 80% dibandingkan posisi tahun Desember 2012 sebesar Rp 476.8 Miliar. Sementara itu, pendanaan juga mengalami peningkatan sebesar 57% menjadi Rp 1.015.8 miliar dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp 646.3 Miliar. Dengan adanya peningkatan pembiayaan dan pendanaan tersebut, maka asset bank juga mengalami peningkatan menjadi Rp 1.324.4 miliar dibandingkan pada Desember 2012 sebesar Rp. 939.5 miliar, yang berarti bertambah 41% sepanjang tahun 2013.

## Industri Perbankan Syariah

Kondisi perekonomian global dan domestik sepanjang 2013 telah memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor ekonomi domestik, termasuk industri perbankan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah pada 2013 tidak sebesar pencapaian pada 2012 atau terjadi sedikit perlambatan.

Pada 2013 (angka sementara dari BI) pertumbuhan total aset perbankan syariah mencapai 19,54%, pembiayaan tumbuh sebesar 22,59% dengan tingkat rasio *Non Performing Financing (NPF)* sebesar 2,96%, sementara pendanaan (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 19,51%, dan laba mengalami peningkatan sebesar 35,58%.

Selain kondisi perekonomian, perbankan syariah nasional harus melakukan berbagai penyesuaian baru terkait dengan beberapa regulasi yang diterbitkan oleh regulator. Salah satu regulasi yang diberlakukan ialah ditetapkan rasio *financing to value (FTV)* terhadap pembiayaan pemilikan rumah syariah (KPR IB) yang menggunakan akad murabahah atau akad *istishna'* paling tinggi sebesar 70%.

**ANI MURDIATI**

Direktur Utama  
Bank Victoria Syariah



# SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

## Komitmen Menuju Bank Ritel Syariah

Memasuki tahun 2014, Bank Victoria Syariah tetap konsisten melanjutkan pengembangan bisnis di segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejalan dengan visi Bank yang ingin menjadi Bank Ritel Syariah Nasional. Guna mendukung kebutuhan nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya Bank Victoria Syariah akan melanjutkan terus inovasi dan diversifikasi produk dan jasa bank. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan penguatan sumber daya insani sudah menjadi keharusan untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

Sementara itu, guna mendukung pelaksanaan visi dan misi bank secara efektif, Bank akan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan azas ketaatan kepada prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam pengelolaan setiap aktivitas usaha. Untuk itu manajemen bank tetap berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas majemen risiko dan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada setiap level kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang semakin baik.

Kami sangat menyadari bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut dibutuhkan sinergi dan dukungan maksimal dari para nasabah dan shareholder lainnya untuk mewujudkan bank ini sebagai Bank Ritel Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah sebagaimana telah ditetapkan menjadi visi Bank Victoria Syariah.

Jalan menuju bank retail bukanlah hal yang mudah bagi bank dengan usia yang masih belia serta size yang masih kecil seperti kami. Dibutuhkan suatu tahapan antara yang harus dijalani untuk mencapai visi tersebut, yaitu harus tercapainya skala ekonomi bank sehingga bank mampu menopang segala aktivitas dalam rangka tujuan akhirnya.

Dalam masa mencapai tujuan inilah, bank menjalankan strategi dengan melengkapi beberapa segmen bisnis di bidang pembiayaan antara lain komersial, konsumen dan bisnis aliansi dengan pelaku usaha yang memiliki jaringan yang luas sehingga dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari bank.

Demikian pula dengan produk-produk *liabilities*, bank mengembangkan berbagai produk baru yang dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan nasabah. Kami berharap, strategi ini akan menjadi pendorong bagi Bank Victoria Syariah untuk berada pada posisi yang diperhitungkan dalam perkembangan industri perbankan syariah di tanah air.

Jalan menuju bank retail bukanlah hal yang mudah bagi bank dengan usia yang masih belia serta size yang masih kecil seperti kami. Dibutuhkan suatu tahapan antara yang harus dijalani untuk mencapai visi tersebut, yaitu harus tercapainya skala ekonomi bank sehingga bank mampu menopang segala aktivitas dalam rangka tujuan akhirnya.



Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas Nama Dewan Direksi

**Ani Murdiati**  
**Direktur Utama**



# SAMBUTAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Mencukupi yang senantiasa menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Victoria Syariah telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian opini atas penerbitan produk baru untuk memastikan aktivitas operasional Bank secara keseluruhan, khususnya dalam hal kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan dan penyediaan jasa-jasa layanan bank lainnya, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).

Tugas-tugas pengawasan yang telah dilakukan DPS selama tahun 2013, dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan kajian (*review*) dari aspek syariah terhadap kebijakan dan prosedur Bank khususnya dalam hal kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan dan penyediaan jasa-jasa layanan Bank lainnya.
2. Memberikan pendapat atau opini atas penerbitan produk baru maupun aktivitas yang akan dilakukan oleh Bank.
3. Melakukan pengawasan melalui uji petik kegiatan operasional Bank khususnya terkait penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan penyediaan jasa-jasa layanan Bank lainnya.

Selain itu, DPS juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Pengawas Bank yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2013, DPS menyatakan bahwa secara keseluruhan, operasional PT Bank Victoria Syariah telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan dukungan Direksi beserta seluruh jajaran manajemen Bank, dalam upayanya menjaga konsistensi dan ketaatan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank. Namun demikian, penyempurnaan pelaksanaan operasional Bank harus senantiasa dilakukan untuk menuju bank syariah yang amanah.

*Billahitaufik walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah

**Prof. Dr. H. Hasanuddin A.F., M.A.**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah



**PROF. DR. H. HASANUDDIN A.F., M.A.**

Ketua Dewan  
Pengawas Syariah



# LAPORAN MANAJEMEN



## Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Perbankan Tahun 2013

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terutama ditopang oleh sektor investasi dan konsumsi rumah tangga, tahun 2013 melambat dibandingkan dengan tahun lalu yaitu dari 6,2% di tahun 2012 menjadi 5,78% di tahun 2013. Penyebab penurunan ekonomi Indonesia tersebut disebabkan karena melemahnya pertumbuhan ekspor riil yang terpengaruh oleh melambatnya ekonomi global.

Secara tahunan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2013 mencapai 8,34% (yoy) atau lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 yang sebesar 4,3% (yoy). Inflasi sepanjang semester I 2013 relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada semester II 2013.

Inflasi kelompok *volatile food* dan *administered prices* pada tahun 2013 masing-masing mencapai 11,83% dan 16,65%. Inflasi *volatile food* dipengaruhi oleh faktor musiman yakni meningkatnya permintaan pada akhir tahun terkait dengan hari raya keagamaan dan tahun baru. Selain itu, inflasi ini dipengaruhi oleh faktor tidak langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan listrik. Di sisi lain, inflasi *administered prices* tahun 2013 relatif tinggi yang disebabkan karena kenaikan harga BBM bersubsidi, tarif dasar listrik dan tarif LPG.

Nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi sepanjang tahun 2013. Tekanan cukup kuat terjadi sejak akhir Mei 2013 sampai dengan Agustus 2013 terkait dengan dinamika perekonomian dunia dan berdampak pada kinerja perekonomian domestik. Nilai tukar rupiah secara *point-to-point* mengalami depresiasi 20,9% (yoy) dari Rp10.075 per dolar di akhir tahun 2013 atau berada di posisi 7,5% yang naik sebesar 175 bps dari posisi 5,75% di akhir tahun 2012.

## Kondisi Perbankan Umum

Secara umum kondisi perbankan tahun 2013 kurang menggembirakan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator rasio keuangan yang memburuk, meskipun ada beberapa yang mengalami perbaikan. Rasio kinerja perbankan yang membaik adalah Rasio Permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Loan* (NPL) *gross*. CAR perbankan nasional tahun 2013 adalah sebesar 18,13% lebih tinggi dibandingkan dengan CAR tahun 2012 yang mencapai 17,43%. Rasio BOPO pada 2013 adalah 74,08% yang turun 0,02% dari 74,10% pada 2012. Rasio NPL *gross* tahun 2013 adalah 1,77% atau turun 0,10% dari 1,87% di tahun 2012.

Rasio kinerja perbankan yang memburuk adalah *Net Interest Margin* (NIM) dan *Return On Asset* (ROA). NIM perbankan adalah 4,89% pada 2013 yang turun 0,60% dari sebesar 5,49% pada 2012. Sementara itu, ROA tahun 2013 adalah 3,08% atau turun 0,03% dari 3,11% di tahun 2012.

## Perkembangan Perbankan Syariah

Upaya perbankan syariah untuk mempertahankan kinerja positif selama tahun 2013 menghadapi tantangan yang tidak mudah. Gejolak perekonomian global yang masih berlanjut serta upaya pemulihan yang berjalan lambat berdampak terhadap kinerja perbankan syariah.

Sampai dengan tahun 2013, jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mencapai 197 Bank, terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan pertumbuhan tersebut, pangsa aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional meningkat dari 4,59% tahun 2012 menjadi 4,89% tahun 2013. Pangsa pasar

DPK perbankan syariah tahun 2013 adalah 5,01% atau naik dari 4,57% pada 2012. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan umum adalah 5,59% di tahun 2013.

Bank Indonesia mencatat bahwa 89% masyarakat Indonesia bersedia menerima prinsip syariah. Indikator perbankan yang sejalan dengan itu adalah meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Sejak tahun 2000, pangsa perbankan syariah selalu meningkat, baik dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan. Aset perbankan syariah tahun 2013 adalah Rp183,53 triliun atau tumbuh 24,23% (yoy) sebesar Rp47,25 triliun dari Rp195,01 triliun di tahun 2012. Pertumbuhan DPK tahun 2013 adalah 24,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK tahun 2012 yang tumbuh 27,81% (yoy).

Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tahun 2013 sebesar 24,82% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan pembiayaan tahun 2012 sebesar 43,69% (yoy). Pembiayaan perbankan syariah tahun 2013 tumbuh sebesar Rp36,61 triliun atau 24,82% menjadi Rp184,12 triliun dari Rp147,50 triliun.

Beberapa rasio kinerja industri perbankan syariah tahun 2013 yang menurun di antaranya ROA, ROE, NPF dan BOPO. Rasio *Return on Asset* (ROA) perbankan syariah adalah 2,00% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 2,14%. Rasio *on Equity* (ROE) perbankan syariah tahun 2013 adalah 17,24% lebih rendah dari tahun 2012 yang mencapai 24,06%. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) memburuk menjadi 2,62% dari sebesar 2,22% pada 2012. Rasio BOPO tahun 2013 naik 3,24% menjadi 78,21% dari sebesar 74,97% di tahun 2012. Rasio yang meningkat adalah permodalan (CAR) yaitu 14,42% pada 2013 dibandingkan 14,13% di tahun 2012.

## Kinerja Keuangan Bank Victoria Syariah Tahun 2013

Seiring dengan kondusifnya kondisi perbankan Indonesia, pada tahun 2013 Bank Victoria Syariah mencatat pertumbuhan yang cukup kuat, baik dari sisi aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan. Selama tahun 2013 aset, Bank Victoria Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 41,32% menjadi Rp1,32 triliun dari Rp937 miliar pada 2012. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 57% menjadi Rp1,015 miliar dari posisi 2012 Rp646,32 miliar, dan pembiayaan tumbuh sebesar 80% menjadi Rp859,8 miliar dari Rp476,8 miliar.

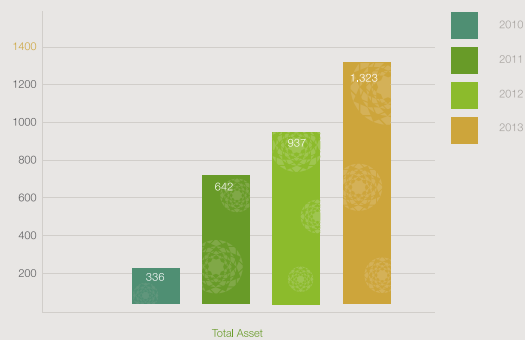
Persentase pertumbuhan Bank Victoria Syariah masih berada di atas pertumbuhan perbankan syariah nasional. Pertumbuhan pembiayaan juga diiringi dengan peningkatan prinsip kehati-hatian sehingga kualitas pembiayaan dapat dijaga pada rasio yang cukup aman dengan kecukupan CKPN yang mencukupi.



## Pertumbuhan Usaha Bank Tahun 2013

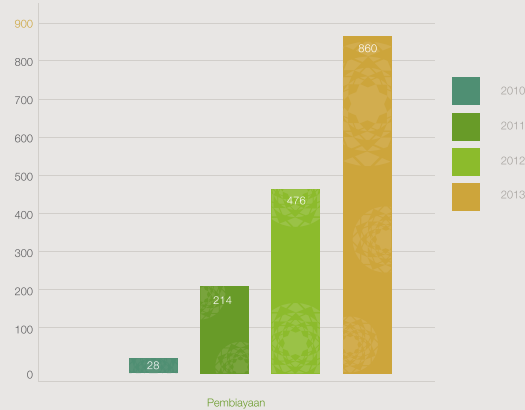
### Total Aset

Selama tahun 2013, PT Bank Victoria Syariah berhasil mencatat total aset sebesar Rp1,323 miliar. Jumlah tersebut meningkat signifikan sebesar 41,21% dibandingkan dengan total aset selama tahun 2012 yang sebesar Rp 937 miliar. Peningkatan aset terbesar Bank bersumber dari penghimpunan dana pihak ketiga dan aktiva produktif.



### Pembiayaan

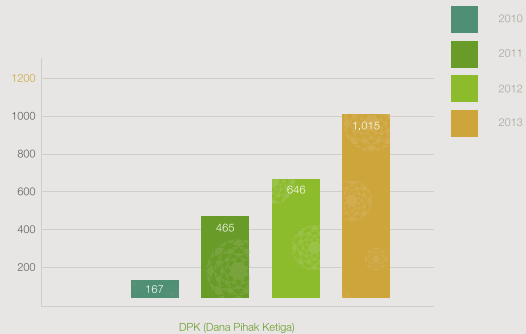
Fungsi intermediasi Bank di tahun 2013 berjalan semakin optimal. Pembiayaan tahun 2013 tumbuh sebesar 80,47% menjadi Rp860 miliar dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp476 miliar. Strategi Bank untuk terjun ke bisnis pembiayaan mikro terbukti membawa dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan pembiayaan di tahun 2013.



### Pendanaan (Dana Pihak Ketiga)

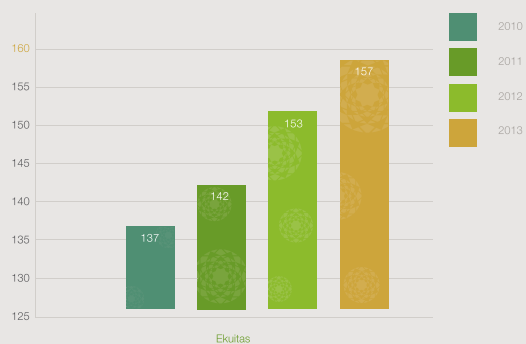
Bertambahnya jumlah jaringan kantor, variasi produk dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Victoria Syariah telah mendorong keberhasilan Bank dalam meningkatkan penghimpunan Dana Pihak ketiga pada tahun 2013. Total penghimpunan Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan signifikan sebesar 57,16% menjadi sebesar Rp1,015 miliar dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp646 miliar.

Kontribusi terbesar dalam hal penghimpunan DPK secara berurutan adalah deposito Rp947 miliar (93,3%), giro wadiah Rp37 miliar (3,64%) serta tabungan sebesar Rp32 miliar (3,06%).



### Ekuitas

Total Ekuitas Bank tahun 2013 meningkat sebesar 2,63% atau Rp4,02 miliar menjadi Rp156,5 miliar dari Rp152,5 miliar pada akhir tahun 2012, hal ini sejalan dengan peningkatan laba bersih pada tahun 2013.



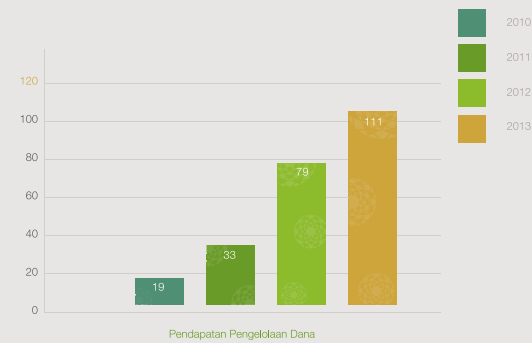
### Laba Bersih

Pada tahun 2013, Bank berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp4,07 miliar, yang turun sebesar Rp6,09 miliar atau 60,2% dari posisi di tahun 2012. Penurunan ini dikarenakan penurunan pendapatan non operasional, di mana pada tahun 2012 Bank membukukan keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp4,7 miliar.

### Analisis Pendapatan dan Beban

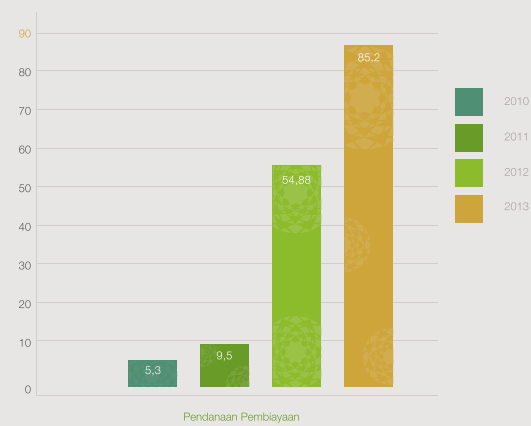
#### Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank

Total pendapatan dana oleh Bank tahun 2013 meningkat 40,25% menjadi sebesar Rp110,9 miliar dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp78,9 miliar. Kenaikan pendapatan pengelolaan dana ini seiring dengan peningkatan pendapatan dari pembiayaan.



#### Pendapatan pembiayaan

Total pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan tercatat naik sebesar 55,47% menjadi Rp85,2 miliar dari Rp54,8 miliar di tahun sebelumnya. Berdasarkan kelompok produk, pendapatan margin murabahah naik 37,25% menjadi Rp68,9milyar dari sebesar Rp50,2 miliar, pendapatan musyarakah naik 273,9% menjadi Rp16,08 miliar dari sebesar Rp4,3 miliar, sementara pendapatan ijarah naik 11,96% menjadi Rp291 juta dari sebesar Rp259 juta.

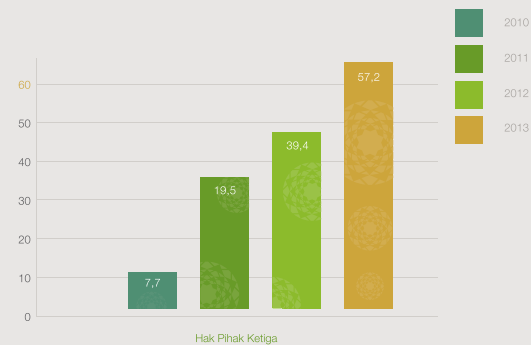


#### Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha pengelolaan dana di luar pembiayaan meningkat 6,60% atau sebesar Rp1,59 menjadi Rp25,7 miliar dari sebesar Rp24,1 miliar di tahun 2012. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dari surat berharga, bonus FAS BIS dan pendapatan administrasi lainnya.

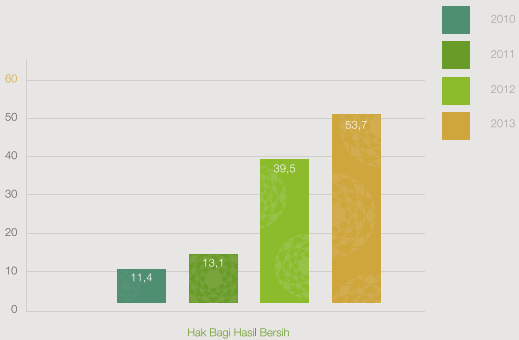
#### Hak Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer selama tahun 2013 meningkat 44,98% atau sebesar Rp17,7 miliar menjadi sebesar Rp57,21 miliar naik dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp39,46 miliar. Peningkatan hak bagi hasil tersebut seiring dengan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga selama tahun 2013.



Hak Bagi Hasil Bersih

Pertumbuhan dari sisi pembiayaan memberikan dampak kenaikan pendapatan bagi hasil untuk Bank dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total pendapatan bagi hasil naik 35,95 % menjadi Rp53,7 miliar dari Rp39,5 miliar pada 2012.



Pendapatan Operasional Lainnya

Total pendapatan operasional lainnya tahun 2013 adalah sebesar Rp1,07 miliar, yang menurun 76,42% dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan pendapatan operasional lainnya ini disebabkan menurunnya pendapatan Bank dari keuntungan penjualan surat berharga, yang pada tahun 2013 dibukukan sebesar Rp890 juta, sedangkan tahun 2012 tercatat sebesar Rp4,3 miliar.

Beban Operasional

Beban Operasional yang terdiri dari Beban Umum & Administrasi, Beban Tenaga Kerja dan Beban Lainnya, tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2013. Total beban operasional tahun 2013 adalah sebesar Rp45,8 miliar yang meningkat 33,52% atau sebesar Rp9,5 miliar dibandingkan dengan beban tahun 2012. Peningkatan beban operasional tahun 2013 sejalan dengan peningkatan aktivitas perusahaan, di antaranya penambahan jaringan kantor, penambahan tenaga kerja, peningkatan beban penyusutan aktiva tetap dan lainnya.

Beban Operational

Keterangan	2013	2012	Kenaikan/Penurunan
Tenaga Kerja	30.7	24.1	6.6
Umum dan Administrasi	13.8	9.1	4.7
Beban Usaha Lainnya	1.2	1.1	0.1
Jumlah Beban Operational Lainnya	45.8	34.3	11.5

Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Selama tahun 2013 penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dibentuk sebesar Rp4,5 miliar, yang naik Rp0,2 miliar dibandingkan dengan tahun 2012 yang dibentuk sebesar Rp4,3 miliar.

Teknologi dan Informasi

Seiring dengan kebutuhan pelayanan bisnis, Bank Victoria Syariah selalu berusaha untuk meningkatkan layanan berbasis teknologi kepada nasabah. Dari sisi keamanan penggunaan teknologi juga sangat menjadi perhatian mengingat keamanan teknologi merupakan ujung tombak dari kepercayaan nasabah. Secara internal IT Bank Victoria Syariah terus melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pelayanan kepada nasabah dan pelaporan kepada Bank Indonesia.

Sumber Daya Insani

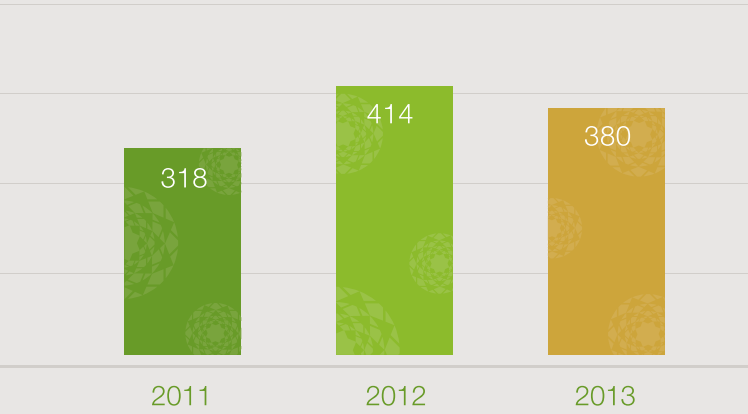
Sumber daya inisani merupakan aset bank dan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya insani Bank mengadakan training internal dan eksternal secara berkesinambungan.

Tujuan pelatihan mengembangkan kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki karyawan. Diharapkan, dengan kompetensi dasar yang telah dikembangkan itu, tidak hanya individu (karyawan) bersangkutan yang diuntungkan tapi juga akan berdampak pada pencitraan Bank di masa mendatang.

Strategi pengembangan SDI dan organisasi berkaitan erat dengan strategi pengembangan bisnis. Beberapa langkah penting yang telah dilakukan manajemen agar strategi pengembangan SDI sejalan dengan strategi bisnis yang telah dirancang perusahaan:

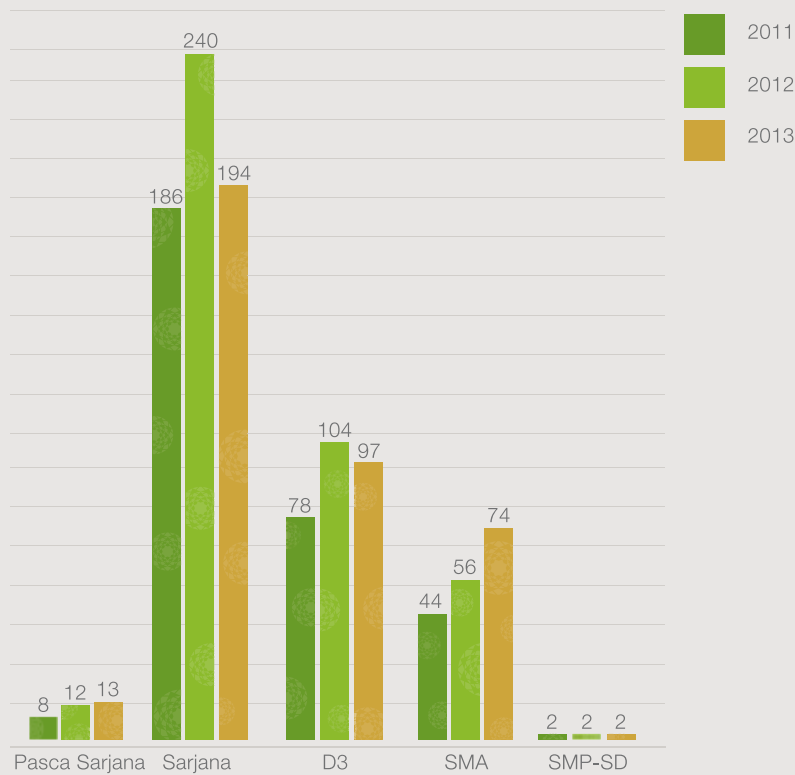
- Meningkatkan kompetensi karyawan yang ada. Hal ini penting dilakukan mengingat persaingan dengan kompetitor, khususnya di industri perbankan syariah, semakin ketat. Langkah yang ditempuh adalah mengadakan pelatihan (training) yang terstruktur, penugasan khusus, coaching dan lainnya.
- Merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan pihak Bank yaitu merekrut karyawan baru sesuai dengan standar kriteria yang ditetapkan untuk mengisi kebutuhan bisnis, terutama untuk pembukaan kantor cabang baru.
- Memperkuat nilai-nilai budaya perusahaan Langkah ini dijalankan agar nilai-nilai tersebut dapat melekat dalam kebiasaan dan proses kerja karyawan, seperti nilai pelayanan, team work, dan kejujuran.
- Harmonisasi untuk kepentingan bisnis perusahaan.

JUMLAH KARYAWAN





KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN



#### Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Victoria Syariah tidak semata-mata berfungsi dan berorientasi kepada Bisnis akan tetapi ada fungsi sosial yang harus dijalankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menegaskan peran sosial kemasyarakatan tersebut. Sehingga Bank Victoria Syariah dapat menerima dan Menyalurkan dana sosial yang ada

Bank Victoria Syariah telah melakukan kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui pembentukan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) BAZNAS PT. Bank Victoria Syariah berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Pelaksana Badal Amil Zakat Nasional Kep. 021/BP/E/BAZNAS/ IX/2010 tanggal 6 September 2010.

#### Sumber dan Penggunaan Dana ZIS

No.	POS-POS	2013	2012
1	Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode	38	25
2	Sumber Dana ZIS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakat dari Bank</li> <li>• Zakat dari Pihak luar Bank</li> <li>• Infaq dan Shadaqah</li> </ul> Total Sumber Dana	- 99 19 118	- 91 24 115
3	Penggunaan Dana Zis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disalurkan melalui BAZNAS</li> <li>• Disalurkan Sendiri</li> </ul> Total Penggunaan	127 - 127	82 22 104
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Penggunaan	(9)	11
5	Sumber Dana Zis pada Akhir Periode	27	36

#### Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan

No.	POS-POS	2013	2012
1	Sumber Dana Qardh Pada Awal Periode	83	133
2	Sumber Dana Qardh <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infaq dan Shadaqah</li> <li>• Denda</li> <li>• Sumbangan/Hibah</li> <li>• Pendapatan Non Halal</li> <li>• Lainnya</li> </ul> Total Sumber Dana	86 - 54 - 11 168	137 - 103 - 34 270
3	Penggunaan Dana Qardh <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman</li> <li>• Sumbangan</li> <li>• Lainnya</li> </ul> Total Penggunaan	130 3 127 127	177 29 148 148
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Penggunaan	(86)	(40)
5	Sumber Dana Qardh pada Akhir Periode	28	93



Ikhtisar Keuangan

Data Keuangan	2013	2012	2011	2010
Total Aset	1.323.398	937.157	642.026	336.676
Pembiayaan	859.944	476.814	214.281	28.196
Dana Pihak Ketiga	1.015.791	646.324	465.036	166.581
Ekuitas	156.608	152.534	139.805	137.098
Pendapatan Operasional	111.775	83.490	73.682	24.462
Bagi Hasil Dana Investor	56.749	39.461	19.3336	7.639
Beban Operasional Lainnya	46.043	34.308	16.772	14.090
Beban Administrasi dan Umum	12.596	8.735	3.538	6.255
Beban Personalia	30.703	24.086	9.416	4.988
Laba (Rugi) Operasional	4.412	5.330	26.727	2.733
Laba Bersih	4.075	10.164	20.599	2.655

(\*Dalam Persen)

Rasio Keuangan

Data Keuangan	2013	2012	2011	2010
1. PERMODALAN				
• Capital Adequacy Ratio (CAR)	18,40	28,08	45,20	195,14
• Aktiva Tetap Terhadap Modal	12,33	8,80	9,07	8,32
2. AKTIVA PRODUKTIF				
• NPF Gross	3,71	3,19	2,43	0,95
• NPF Nett	3,31	2,41	1,94	0,00
• PPA Produktif Terhadap Aktiva Produktif	1,02	1,04	0,80	0,21
• Pemenuhan PPA Produktif	103,88	102,79	138,67	137,86
3. RENTABILITAS				
• Return On Asset (ROA)	0,50	1,43	6,93	1,09
• Return On Equity (ROE)	3,70	8,93	18,69	2,41
• Net Interest Margin (NIM)	2,96	2,36	2,12	6,82
• Operational Efficiency Ratio (BOPO)	91,95	87,90	86,4	83,75
4. LIKUIDITAS				
• Financing Deposit Ratio (FDR)	84,65	46,08	46,08	16,98

(\*Dalam Satuan Juta Rupiah)



AKTIVA

AKTIVA	2013	2012	2011	2010
Kas	4.045	1.807	594	666
Giro Wadiah Pada Bank Indonesia	47.538	23.328	13.164	11.359
Fasilitas FASBIS	196.000	188.800	151.800	17.600
Antarbank Aktiva	4.913	23.390	122.229	490
Surat Berharga Yang Dimiliki	187.692	202.654	121.459	254.105
Piutang Murabahah	581.716	396.821	195.530	26.039
Pembiayaan	277.662	79.562	18.428	1.662
Penyertaan	60	60	60	60
Ijarah Bersih	476	431	323	495
Aktiva Pajak Tangguhan	1.638	1.084	407	328
Aktiva Tetap - Bersih	14.173	13.568	12.317	10.087
Rupa-rupa Aktiva	7.485	7.967	5.715	13.785
TOTAL AKTIVA	1.323.396	939.472	642.026	336.676

(\*Dalam Satuan Juta Rupiah)

PASIVA

PASIVA	2013	2012	2011	2010
Kewajiban	187.642	161.748	64.563	35.773
Dana Simpanan Wadiah	36.617	21.134	30.033	2.776
Kewajiban Segera Lainnya	2.784	1.795	682	831
Kewajiban Pada Bank Lain	138.007	131.707	25.075	29.800
Rupa-rupa Pasiva	7.973	7.112	8.863	2.366
Dana Investasi Tidak Terikat Mudharabah	979.175	625.190	435.003	163.805
• Tabungan	31.752	11.046	4.994	5.208
• Deposito	947.423	614.144	430.009	158.597
Ekuitas	156.610	152.534	142.370	137.098
Modal Disetor	110.000	110.000	110.000	110.000
Laba Rugi Surat Berharga Belum Direalisasi	(28)	(2.315)	(2.565)	15.287
Cadangan Umum	9.156	9.156	9.156	9.156
Laba Rugi Tahun Lalu	33.378	23.214	2.655	0
Laba Rugi Tahun Berjalan	4.928	10.394	26.812	3.013
Taksiran Pajak Penghasilan	(853)	(230)	(6.253)	(358)
TOTAL PASIVA	1.323.398	939.472	642.026	336.676

LABA RUGI

LABA RUGI	2013	2012	2011	2010
PENDAPATAN OPERASIONAL	112.047	83.490	68.870	24.462
PENDAPATAN DARI PENYALURAN DANA	110.973	74.078	31.030	18.864
• Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	109.245	72.018	27.465	17.192
• Dari Bank Indonesia	1.549	1.231	2.182	455
• Dari Bank Lain	179	829	1.383	1.217
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	1.075	9.412	37.840	5.598
• Jasa Layanan	-	2.297	1.471	101
• Koreksi PPAP	-	-	1.016	1.825
• Lainnya	1.075	7.115	35.353	3.672
BAGI HASIL UNTUK INVESTOR DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT	57.214	39.461	19.336	7.639
• Pihak Ketiga Bukan Bank	57.214	36.221	18.035	7.531
• Bank Indonesia	-	-	-	-
• Bank-bank Lain		3.240	1.301	108
PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL UNTUK INVESTOR DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT	53.759	44.029	49.534	16.823
Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva	4.571	4.391	6.174	-
Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	-	-	-	-
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	45.873	34.308	16.633	14.090
• Beban Bonus Titipan Wadiah		226	195	64
• Biaya Administrasi dan Umum	13.885	8.735	6.313	6.255
• Biaya Personalia	30.703	24.086	9.402	4.988
• Beban Lainnya	1.285	1.261	7.233	2.783
LABA (RUGI) OPERASIONAL	4.389	5.330	26.727	2.733
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
Pendapatan Non-Operasional	694	5.125	130	313
Beban Non-Operasional	155	61	45	33
Laba (Rugi) Non-Operasional	539	5.064	85	280
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	4.928	10.394	26.812	3.013
Taksiran Pajak Penghasilan	(853)	(230)	(6.253)	(358)
JUMLAH LABA (RUGI)	4.075	10.164	20.559	2.655

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) menjadi komitmen utama Bank Victoria Syariah dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi; Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness selalu dikomunikasikan dan diinternalisasi pada setiap level manajemen melalui berbagai kegiatan. Langkah ini merupakan bagian dari target perusahaan untuk menjadikan GCG sebagai budaya dalam perusahaan (corporate culture). Dengan budaya dan karakter tersebut, dalam setiap aktivitas bisnisnya Bank Victoria Syariah akan selalu berpatokan pada prinsip-prinsip GCG.

Bank Victoria Syariah menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut dan selaras dengan perkembangan usahanya, maka secara berkesinambungan Bank berupaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 / PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan serta memenuhi prinsip syariah.

### 1. DEWAN KOMISARIS

#### 1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
  - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank
  - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
  - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
  - e. Batas maksimum penyaluran dana
  - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
  - a. Komite Pemantau Risiko
  - b. Komite Audit
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 8 menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.



### 1.2. Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2013 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain:

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar
3. Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia
4. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit

### 1.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaris Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah No. 02 tanggal 01 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 24 Januari 2013 tentang rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank dimana Sdr. Soehanda Djajakoesoema sebagai Direktur Kepatuhan menempati posisi sebagai anggota Dewan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Bank Indonesia, terdiri atas:

Nama Dewan Komisaris	Jabatan
Pangulu Oloan Simorangkir	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Soehanda Djajakoesoema	Komisaris Independen
Akhmad Supandi Wahyuseputra	Komisaris Independen

- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang adalah tidak sama dengan jumlah anggota Direksi yang berjumlah 4 (empat).
  - c. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

5. Kecukupan Permodalan Bank
6. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
7. Likuiditas Bank
8. Tingkat kesehatan dan profil risiko Bank
9. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI)
10. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
11. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan perundang-undangan lainnya.
12. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

### 1.4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan rapat gabungan guna membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2013, telah dilakukan 9 (sembilan) kali rapat Dewan Komisaris dan 11 (sebelas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan hasil seluruh rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

#### Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2013

Nama Pejabat	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Kehadiran	Persentase
Pangulu Oloan Simorangkir	9	100%	10	91%
Soehanda Djajakoesoema*	7	77%	7	63%
Akhmad Supandi Wahyuseputra	9	100%	11	100%
<b>Total Rapat</b>	<b>9</b>		<b>11</b>	

\*efektif mendapat persetujuan BI tanggal 2 September 2013

### 1.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	Persetujuan BI	RUPS	Masa Jabatan Berakhir
Pangulu Oloan Simorangkir	Komisaris Utama/ Independen	10 Februari 2010	1 April 2013	RUPS 2015
Soehanda Djajakoesoema	Komisaris Independen	02 September 2013	1 April 2013	RUPS 2015
Akhmad Supandi Wahyuseputra	Komisaris Independen	06 September 2012	1 April 2013	RUPS 2015

### 1.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2013, Anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang dipersyaratkan.

### 1.7. Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2013 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 4) Melakukan evaluasi tindak lanjut Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/ atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 6) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 21 November 2013 No.306/DIR-SK/JKT/XI/2013, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua komite: Soehanda Djakoesoema  
Anggota: Retno Dwiyanti Widaningsih  
Anggota: Supriyono

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Komite Audit juga telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2013, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 5 (lima) kali rapat dengan agenda:

- 1. Hasil penelaahan atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern SKAI tahun 2012 serta *Management Report* per akhir Desember 2012
- 2. Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI periode Juli 2012-Desember 2012 PT. Bank Victoria Syariah
- 3. Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi Publikasi per 31 Desember 2012 PT. Bank Victoria Syariah
- 4. Pembahasan Penerapan Strategi Anti Fraud oleh Unit Kerja Anti Fraud
- 5. Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi per 31 Maret 2013 PT. Bank Victoria Syariah.

2. Komite Pemantau Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantauan Risiko adalah:

- 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan asset dan liabilitas, likuiditas, pembiayaan serta operasional
- 2) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko
- 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 5) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank
- 6) Melakukan kajian konsep laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Bank Indonesia
- 7) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 21 November 2013 No.307/DIR-SK/JKT/XI/2013, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua Komite: Akhmad Supandi  
Wahyusaputra

Anggota: Tonny Setiadi

Anggota: Supriyono

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 4 (empat) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2013, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembahasan mengenai pelaporan profil risiko Bank terutama yang berkategori *high risk* dan *moderate to high*, serta mitigasinya
- 2) Pembahasan hasil penelaahan Surat Bank Indonesia atau pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* tahun 2012 Bank
- 3) Mitigasi risiko inheren untuk debitur inti
- 4) Pengembangan SDI untuk program pendidikan baik intern maupun ekstern yang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan RBB sehingga target rasio pendidikan dan pengembangan SDI terhadap biaya tenaga kerja secara bertahap dapat tercapai
- 5) Kepala Divisi terkait wajib menginformasikan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan atas risiko inheren yang tergolong *high* dan *moderate to high*
- 6) Penyelesaian NPF/pembiayaan kolektibilitas KL, Diragukan dan Macet
- 7) Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan *stress testing*, dan dari hasilnya, Bank dapat mempertimbangkan kebijakan
- 8) Meningkatkan SDI SKAI dengan pendidikan yang memadai.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
  - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi



- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Prestasi kerja individual
  - Kewajaran dengan *peer group*
  - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
- 3) Terkait dengan kebijakan nominasi:
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 4) Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
- 5) Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.
- b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite
- Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 15 April 2013 No.

34b/DIR-SK/JKT/VII/2013, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite: Pangulu Oloan Simorangkir  
Anggota: Soehanda Djajakoesoma  
Anggota: Erik Pradityo

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2013, Komite Remunersi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 3 (tiga) kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana pengembangan struktur organisasi khususnya terkait dengan perubahan susunan pengurus Bank dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan bisnis Bank
- 2) Rekomendasi pencalonan anggota Direksi yang baru Sdri. Ani Murdiati untuk dicalonkan menjabat sebagai Direktur Utama Bank.
- 3) Rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank
- 4) Penetapan Sdr. Soehanda Djajakoesoema sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- 5) Penyempurnaan pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. DIREKSI

2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah:

- a. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- c. Mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham
- f. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan bank umum syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
- g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Susunan anggota Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Direktur Utama: Ani Murdiati  
Direktur Operasional: Sari Idayanti  
Direktur Bisnis: Sutrisno Yulianto  
Direktur Kepatuhan: Djoko Nugroho

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

2.3. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2013, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 11 (sebelas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Kehadiran	Persentase
Ani Murdiati	11	92%	11	100%
Sari Idayanti	12	100%	11	100%
Djoko Nugroho	11	92%	11	100%
Sutrisno Yulianto	12	100%	11	100%
Total Rapat	12	100%	11	100%

2.4. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank:

Nama	Jabatan	Persetujuan BI	RUPS	Masa Jabatan Berakhir
Ani Murdiati	Direktur Utama	14 Mei 2013	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015
Sari Idayanti	Direktur Operasional	10 Februari 2010	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015
Djoko Nugroho	Direktur Kepatuhan	2 September 2013	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015
Sutrisno Yulianto	Direktur Bisnis	7 Maret 2013	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015

2.5. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2013, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Sertifikasi Manajemen Risiko
Ani Murdiati	Direktur Utama	Level 5 (lima)
Sari Idayanti	Direktur Operasional	Level 3 (tiga)
Djoko Nugroho	Direktur Kepatuhan	Level 3 (tiga)
Sutrisno Yulianto	Direktur Bisnis	Level 4 (empat)

2.6. Komite-Komite di Tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko
- Komite Pembiayaan
- Asset and Liabilities Committee (ALCO)*
- Komite Teknologi Sistem Informasi

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan

kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

1. Komite Manajemen Risiko

Adalah komite yang dibentuk berdasarkan SK Direksi No.001a/DIR-SK/JKT/IV/2013 tanggal 01 April 2013, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Komite ini juga merupakan wadah pengambilan keputusan, pengevaluasian perumusan dan penerapan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko di mana Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas semua Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait.

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi dan/atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
- Perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan butir 1 tersebut di atas
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

b. Susunan Anggota Komite

Komite Manajemen Risiko memiliki susunan anggota yang diangkat oleh Direksi sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Kepatuhan
- Wakil Ketua: Direktur Utama
- Anggota: Direktur Bisnis  
Direktur Operasional
- Sekretaris: Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Anggota: Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan  
Kepala Divisi SDI dan Umum  
Kepala Divisi Operasional  
Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern

- Anggota:
- Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan
  - Kepala Divisi Treasury dan FI
  - Kepala Divisi TSI
  - Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Pembiayaan
  - Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Retail
  - Kepala Divisi Perencanaan Strategi Korporat

c. Rapat Komite

Selama tahun 2013, Komite Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 6 (enam) kali.

2. Komite Pembiayaan

Adalah komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan pengeluaran pembiayaan, perpanjangan dan perubahan pembiayaan dalam batas wewenang yang berlaku.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

Tugas Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pembiayaan berdasarkan usulan *Marketing Officer* dan/atau Kantor Cabang.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan pembiayaan yang melebihi wewenang Direksi berdasarkan usulan *Marketing Officer* dan/atau Kantor Cabang.



**b. Keanggotaan Komite Pembiayaan**

Keanggotaan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Utama
- Anggota: Direktur Bisnis  
Direktur Operasional
- Anggota merangkap Sekretaris: Kepala Divisi Pembiayaan

**3. Asset and Liabilities Committee (ALCO)**

Adalah komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Assets and Liabilities Management (ALMA)* sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan ke depan.
- Maturity mismatch yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.
- Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Assets and Liabilities Committee (ALCO)* yang merupakan suatu komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets and Liabilities Management (ALMA)* serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan Bank.

**a. Keanggotaan ALCO:**

- Ketua: Direktur Utama
- Wakil Ketua: Direktur Operasional  
Direktur Bisnis  
Direktur Kepatuhan

- Sekretaris: Kepala Divisi Treasury & Financial Institution
- Anggota: Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan  
Kepala Divisi Operasional & Adm. Pembiayaan  
Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan  
Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Pembiayaan  
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Retail  
Kepala Divisi Perencanaan Strategi Korporat  
Kepala Divisi Manajemen Pemasaran

Rapat ALCO dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu, maka keputusan ALCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank. Selama 2013, ALCO telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali.

**b. Fungsi ALCO:**

- 1) Menyusun kebijakan dan strategi ALMA
  - a) Mengambil keputusan atas transaksi-transaksi ALMA

- b) Menyusun strategi untuk penempatan dana, lindung nilai (*hedging*), eksposur tingkat suku bunga, pendanaan, penentuan harga (*pricing*)
- c) Menetapkan limit mengenai tingkat bagi hasil, risiko likuiditas, produk, portofolio investasi
- d) Mengukur risiko bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan yang tersedia.

2) Pengendalian Modal

- a) Memonitor setiap hari pemakaian modal sesuai ketentuan
- b) Memfokuskan perhatian kedua sisi neraca, aktiva dan kewajiban.

3) Pengendalian Krisis

- a) Membuat daftar urutan aktiva menurut seberapa cepat dan mudah dapat dijual/dicairkan
- b) Mempertimbangkan sekuritisasi sisi aktiva neraca
- c) Memonitor kemampuan pendanaan menurut produk dan kategorinya
- d) Memonitor *mismatch* pendanaan
- e) Menjaga komunikasi yang efektif dengan Bank Indonesia
- f) Memberikan informasi kepada para *stakeholders* dengan data-data yang akurat dan terkini
- g) Membatasi pengaruh (*impact*) risiko likuiditas dengan membuat analisa skenario.

**4. Komite Teknologi Sistem Informasi**

Pembentukan Komite Teknologi Sistem Informasi sejalan dengan penerapan dan pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang mampu:

- Memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan operasional bank.
- Menentukan arah dan tujuan setiap penerapan dan pengembangan TSI.

**a. Keanggotaan Komite TSI**

Keanggotaan Komite TSI ditetapkan terdiri atas pejabat-pejabat berikut:

- Ketua: Direktur Utama
- Koordinator: Direktur Operasional
- Wakil Koordinator: Direktur Bisnis  
Direktur Kepatuhan
- Sekretaris: Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi
- Anggota: Kepala Divisi Operasional  
Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan  
Kepala Divisi Pembiayaan  
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Retail  
Kepala Divisi Pengembangan Produk Pembiayaan  
Kepala Divisi Perencanaan Korporat  
Kepala Divisi SDI dan Umum  
Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

**b. Tugas dan Tanggung Jawab**

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi, khususnya mengenai:

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- 2) Perumusan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi.
- 3) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.

- 4) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement (SLA)*.
- 5) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- 6) Efektivitas langkah-langkah manajemen risiko Teknologi Informasi.
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank

**c. Rapat Komite**

Rapat Komite selama tahun 2013 telah terlaksana selama 2 (dua) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

3. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:

- 1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
- 2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional

- dan produk yang dikeluarkan Bank;
- 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- 5. Melakukan tinjauan secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
- 7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

3.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain:

- 1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip syariah.
- 3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktivitas operasional Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- 4. Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2013 telah disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2013 dan

- Semester II tahun 2013 disampaikan pada tanggal 26 Februari 2014.
- 5. Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013 telah dilakukan sebanyak 17 opini.

3.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang

dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari:

Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
Prof. Dr. Hasanuddin A.F., M.A.	Ketua
Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.	Anggota

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah:

Prof. Dr. H.Hasanuddin A.F., M.A.	Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido, M.A.
1. Asuransi Tripakarta	1. Asuransi AXA
2. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	2. Asuransi Jasa Raharja
3. PT. Jamkrindo	3. Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

3.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, namun di luar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:



Nama Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. Dr. Hasanudin A.F., M.A.	21	100%
Prof. Dr. Huzaima Tahido Yanggo, M.A.	21	100%
Total Rapat	21	100%

3.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

Nama Pejabat	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
	Persetujuan BI	RUPS	
Prof. Dr. Hasanudin A.F., M.A.	10 Februari 2010	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015
Prof. Dr. Huzaima Tahido Yanggo, M.A.	02 Maret 2012	RUPSLB 01 April 2013	RUPS 2015

4. KEPATUHAN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999, bank wajib untuk menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2 /PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank

- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah
- Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal pembiayaan di atas jumlah tertentu
- Melakukan pengkajian atas kebijakan dan prosedur Bank atau kebijakan strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur Kepatuhan diatur dalam prosedur tersendiri
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang

diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

4.2. Program Kerja Tahun 2013 dan Realisasinya

- Revisi Kebijakan APU & PPT  
Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan. Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut:  
a) Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK)  
b) Menyosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Insani (SDI) Bank  
c) Melengkapi dan melakukan pengkinian data nasabah secara berkelanjutan.
- Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
- Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
- Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya
- Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan induk perusahaan (PT Bank Victoria International Tbk)
- Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko

- Memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris
- Sosialisasi peraturan Bank Indonesia kepada unit-unit kerja terkait
- Memantau tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah dan Divisi Internal Audit (SKAI)
- Memastikan penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- Memantau pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2013, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

- Tidak terdapat pelanggaran atau pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)
- Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia (8%)
- Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 5%
- Rasio NPF-*gross* sebesar 3,72% dan NPF- net sebesar 3,33%
- Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 113%
- Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2013 sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tjahjadi & Tamara (T&T) Member of Morison International”
- Berdasarkan laporan kepada Bank Indonesia, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

5. AUDIT INTERN

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berfungsi sebagai organisasi independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

SKAI dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB), SK Direksi No.002/DEKOM-SP/JKT/IV/2010 tentang Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengendalian Intern dan Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern yang telah disetujui Direksi dan Komisaris pada tanggal 13 Januari 2013.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

No.	Obyek Pemeriksaan	Jadwal Pemeriksaan
1.	Kantor Pusat Operasional (KPO)	22 - 31 Januari 2013
2.	Capem Tebet	3 - 9 April 2013
3.	Cabang Bekasi	3 - 9 April 2013
4.	Cabang Tegal	21 - 22 Mei 2013
5.	Cabang Depok	22 - 25 Mei 2013
6.	Capem Kramat Djati	22 - 25 Mei 2013
7.	Capem Banjaran	23 Mei 2013
8.	Capem Brebes	24 Mei 2013
9.	Cabang Cirebon	10 – 11 Juni 2013
10.	Capem Arjawinangun	12 Juni 2013
11.	Capem Kuningan	13 Juni 2013
12.	Cabang Serang	19 – 21 Juni 2013
13.	Divisi Teknologi Sistem Informasi (TSI)	4 – 5 September 2013
14.	Sistem Kliring Nasional (SKN)	4 – 5 September 2013
15.	Real Time Gross Settlement (RTGS)	4 – 5 September 2013
16.	Divisi Treasury	22 – 24 Oktober 2013
17.	Cabang Pembantu Tangerang	22 – 25 Oktober 2013
18.	Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	11 November 2013 s/d Selesai

5.1. Tujuan dan Cakupan Audit

1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan SME, Mikro, Operasional, Treasury, TSI, dan lainnya.

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas pembiayaan, risiko strategik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruhnya relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Capem dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

5.2. Program Kerja Selama Tahun 2013 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan realisasi pelaksanaan audit selama tahun 2013 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

6. AUDITOR INDEPENDEN

Auditor ekstern memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance (GCG)*. Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor ekstern untuk mendukung kelancaran tugas manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2013.

Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Bank Indonesia.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, lembaga pemeringkat dan lembaga penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id).

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari:

- 1. Informasi umum mengenai: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen
- 2. Laporan keuangan tahunan
- 3. Opini dari Akuntan Publik/auditor eksternal
- 4. Seluruh aspek transparansi dan informasi
- 5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPS
- 6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank
- 7. Informasi lainnya.

7. MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

7.1. Manajemen Risiko

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui struktur organisasi yang dibentuk, kebijakan dan prosedur limit-limit dan komite-komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liabilities Committee (ALCO)* serta Komite Teknologi Sistem Informasi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2013, adalah sebagaimana tabel berikut:



Hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2013

No.	Risiko	Risiko Inherent	<i>Risk Control System</i>	Risiko Komposit
1.	Kredit	<i>Low To Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low To Moderate</i>
2.	Pasar	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
3.	Likuiditas	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
4.	Oprasional	<i>Low To Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low To Moderate</i>
5.	Kepatuhan	<i>Low To Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low To Moderate</i>
6.	Hukum	<i>Low</i>	<i>Fair</i>	<i>Low To Moderate</i>
7.	Reputasi	<i>Low</i>	<i>Fair</i>	<i>Low To Moderate</i>
8.	Stratejik	<i>Moderate To High</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate To High</i>
	Keseluruhan	<i>Low To Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low To Moderate</i>

7.2. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

Kinerja yang baik dan meningkatnya nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik di setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
- Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
- Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

8. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR

Selama tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/grup selama tahun 2013, adalah sebagai berikut.

Penyediaan Dana Pihak Terkait

No.	Bulan	Modal	BMPD 10%	Maks. Realisasi
1.	Januari	160.682	16.068	6.715
2.	Febuari	161.420	16.142	7.339
3.	Maret	161.106	16.110	6.261
4.	April	161.368	16.137	6.194
5.	Mei	159.865	15.987	6.223
6.	Juni	162.482	16.248	2.588
7.	Juli	163.637	16.363	3.467
8.	Agustus	164.863	16.486	3.502
9.	September	165.785	16.578	3.569
10.	Oktober	166.989	16.699	3.776
11.	Nopember	165.476	16.547	3.671
12.	Desember	166.808	16.680	3.632

\*) Penyediaan dana kepada pihak terkait meliputi pembiayaan, penyertaan, fasilitas antar bank

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (*Group Obligor*)

No.	Bulan	Modal	BMPD 20%	Individu	BMPD 25%	Grup
1.	Januari	160.682	32.136	23.888	40.171	14.059
2.	Febuari	161.420	32.284	23.724	40.355	13.681
3.	Maret	161.106	32.221	23.559	40.277	16.003
4.	April	161.368	32.274	23.391	40.342	9.367
5.	Mei	159.865	31.973	23.221	39.966	9.754
6.	Juni	162.482	32.496	23.050	40.621	15.077
7.	Juli	163.637	32.727	30.000	40.909	31.512
8.	Agustus	164.863	32.272	29.866	41.716	30.906
9.	September	165.785	33.157	29.865	41.446	30.603
10.	Oktober	166.989	33.399	29.862	41.747	30.298
11.	Nopember	165.476	33.095	29.860	41.369	14.668
12.	Desember	166.808	33.362	29.858	41.702	29.784

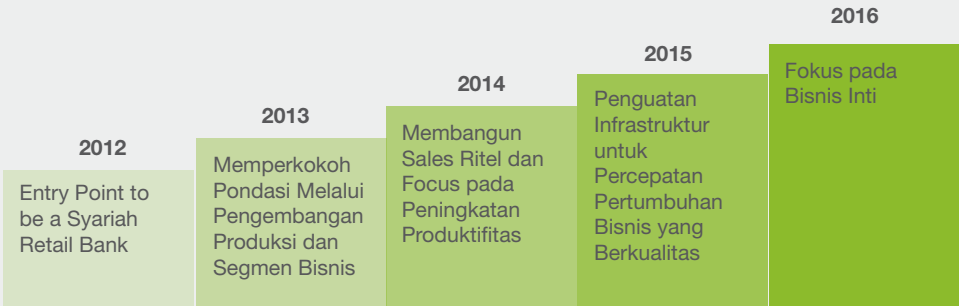
9. RENCANA BISNIS

9.1. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 1 April 2010 ini terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi Bank Ritel Syariah Nasional dalam industri perbankan syariah nasional. Masuknya bank ini ke dalam segmen pembiayaan mikro pada bulan November 2011 menjadi tonggak peristiwa sebagai *entry point* dalam menuju Visi: Menjadi Bank Ritel Syariah Nasional yang Tumbuh dan Berkembang Secara Sehat dan Amanah. Pada kuartal pertama tahun 2013, manajemen sepakat untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai bank ritel syariah dengan melakukan pengembangan segmen baru untuk percepatan pertumbuhan aset perusahaan, namun tetap fokus pada segmen ritel. Pada tahun ini pula, Bank melengkapi berbagai produk pembiayaan maupun pendanaan ritel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bulan September 2013 adalah saat penting bagi Bank karena berhasil membukukan aset sebesar Rp1,096 miliar, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stakeholder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra bank ini dalam percaturan industri perbankan syariah nasional. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp1,205 miliar pada akhir tahun 2013, atau meningkat 28% dibandingkan bulan Desember 2012 sebesar Rp939 miliar.

Adapun tolok ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:



Pos-pos (dalam jutaan Rp)	Des-12 Realisasi	Des-13	Tahun I Des-14	Tahun II Des-15	Tahun III Des-16
Aset	939,472	1,205,030	2,217,399	3,387,532	4,242,005
Pembiayaan	476,814	828,692	1,574,515	2,471,989	3,159,987
Dana Pihak Ketiga	646,324	913,192	1,709,192	2,739,192	3,508,422
Modal Disetor	110,000	110,000	160,000	235,000	235,000
L/R Tahun Berjalan (sebelum pajak)	10,394	11,159	45,882	75,945	98,964
% Pertumbuhan Aset	46%	28%	84%	53%	24%
% Porsi UMKM	24%	22%	30%	35%	40%

Penyusunan target jangka pendek dan menengah tahun 2014 – 2016 didasarkan pada kinerja Bank dan indikator keuangan periode September 2013, kondisi makro ekonomi dan kondisi perbankan nasional.

9.2. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

	RASIO-RASIO	PROYEKSI				
		Des-13	Mar-14	Jun-14	Sep-14	Des-14
1	Capital Adequacy Ratio (CAR)	19.97%	17.54%	15.10%	17.32%	15.89%
2	Non Performing Financing ( NPF ):					
	a. NPF Gross	3.11%	3.18%	2.90%	2.68%	2.49%
	b. NPF Nett	2.14%	2.23%	2.12%	2.01%	1.90%
3	Return On Equity (ROE)	7.61%	12.18%	13.55%	12.10%	13.72%
4	Return On Assets (ROA)	1.14%	1.88%	2.03%	2.27%	2.55%
5	Net Operating Margin (NOM)	5.52%	5.26%	4.95%	4.82%	4.75%
6	Rasio Efisiensi Operasional (REO)	78.52%	68.00%	65.46%	62.33%	58.89%
7	BOPO	91.01%	84.90%	83.81%	81.94%	79.98%
8	OHC/TA	2.14%	0.31%	1.72%	2.36%	2.96%
9	OHC/PO	24.62%	31.69%	30.68%	29.88%	28.68%
10	Financial to Deposits Ratio (FDR)	90.75%	88.28%	90.81%	90.95%	92.12%
11	Cost of Fund	8.93%	9.31%	9.15%	8.58%	8.51%

9.3. Target Jangka Pendek dan Menengah

1. Melihat ketatnya persaingan industri perbankan nasional dalam memperkuat struktur likuiditas melalui penghimpunan dana pihak ketiga, maka Bank akan menjalankan strategi penggalangan dana melalui pemenuhan tenaga pemasaran pendanaan (*funding officer* atau *FO*) minimal dua orang per cabang, pembuatan produk pendanaan yang kompetitif dan menarik bagi nasabah, meluncurkan kartu Debit yang bekerja sama dengan jaringan Prima, program *cross selling* dengan nasabah pembiayaan serta penambahan jaringan kantor cabang melalui konsep *Distribution Channel (DC)*, dimana Bank dapat membuka layanan syariah di kantor cabang Bank Victoria International.
2. Bisnis pembiayaan juga akan menjalankan strategi berupa pengembangan SDI, percepatan proses, pengembangan produk dan aktifitas baru, strategi pemasaran yang fokus serta perbaikan kualitas pembiayaan.
3. Pada saat yang bersamaan, Bank akan membenahi teknologi dan sistem informasi, meningkatkan *brand awareness* melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya, dengan mengikuti pameran dan wawancara di media elektronik dan cetak.



10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

10.1. Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tercatat tidak ada, sebagaimana tabel berikut.

NAMA	KEPEMILIKAN			
	Bank	%	Perusahaan lain	%
Dewan Komisaris				
Pangulu O. Simorangkir	-	-	nihil	-
Soehanda Djakoesoema	-	-	nihil	-
A.S. Wahyu Saputra	-	-	nihil	-
Direksi				
Ani Murdianti	-	-	nihil	-
Sari Idayanti	-	-	nihil	-
Djoko Nugroho	-	-	nihil	-
Sutrisno Yulianto	-	-	nihil	-

10.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

10.3. Share Option

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan shares option tersebut.

11. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

10.1. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2013.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

Peringkat 1 (satu) dengan nilai 0,14 predikat Sangat Baik

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor
- Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Peringkat 1 (satu) dengan nilai 0,20 predikat Sangat Baik

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
- Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor
- Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris
- Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,21 predikat Baik

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan
- Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor
- Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara sangat efektif dan efisien
- Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas syariah sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

**Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,20 predikat Baik**

**5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa:**

Seluruh produk yang dimiliki oleh Bank baik penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk layanan jasa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan opini syariah dari DPS.

**Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,09 predikat Baik**

**6. Penanganan benturan kepentingan**

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif
- Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

**Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,20 predikat Baik**

**7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank**

- Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan tinjauan secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Peringkat 1 (satu) dengan nilai 0,07 predikat Sangat Baik**

**8. Penerapan fungsi audit intern**

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah dapat diatasi dengan tindakan rutin
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

**Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,08 predikat Baik.**

**9. Penerapan fungsi audit ekstern**

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

**Peringkat 1 (satu) dengan nilai 0,06 predikat Sangat Baik**

**10. Batas Maksimum Penyaluran Dana**

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- Tidak ada pelanggaran BMPD dan maupun prinsip kehati-hatian
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

**Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,08 predikat Baik**

**11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal**

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

**Peringkat 2 (dua) dengan nilai 0,33 predikat Baik**

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia.



No.	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai
		(a)	(b)	(a) x (b)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12,50%	0,14
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17,50%	0,20
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	2	10,00%	0,21
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10,00%	0,20
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5,00%	0,09
6.	Penanganan benturan kepentingan	2	10,00%	0,20
7.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5,00%	0,07
8.	Penerapan fungsi audit intern	2	5,00%	0,08
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5,00%	0,06
10.	Batas Maksimum Panyaluran Dana	2	5,00%	0,08
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15,00%	0,33
Nilai Komposit			100,00%	1,66
Hasil <i>analisis self assessment</i> menunjukan bahwa pelaksanaan GCG BUS sesuai dengan kriteria / indikator dengan predikat <b>Baik</b> .				

Parameter Penilaian Self Assessment

Nilai	Pedikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

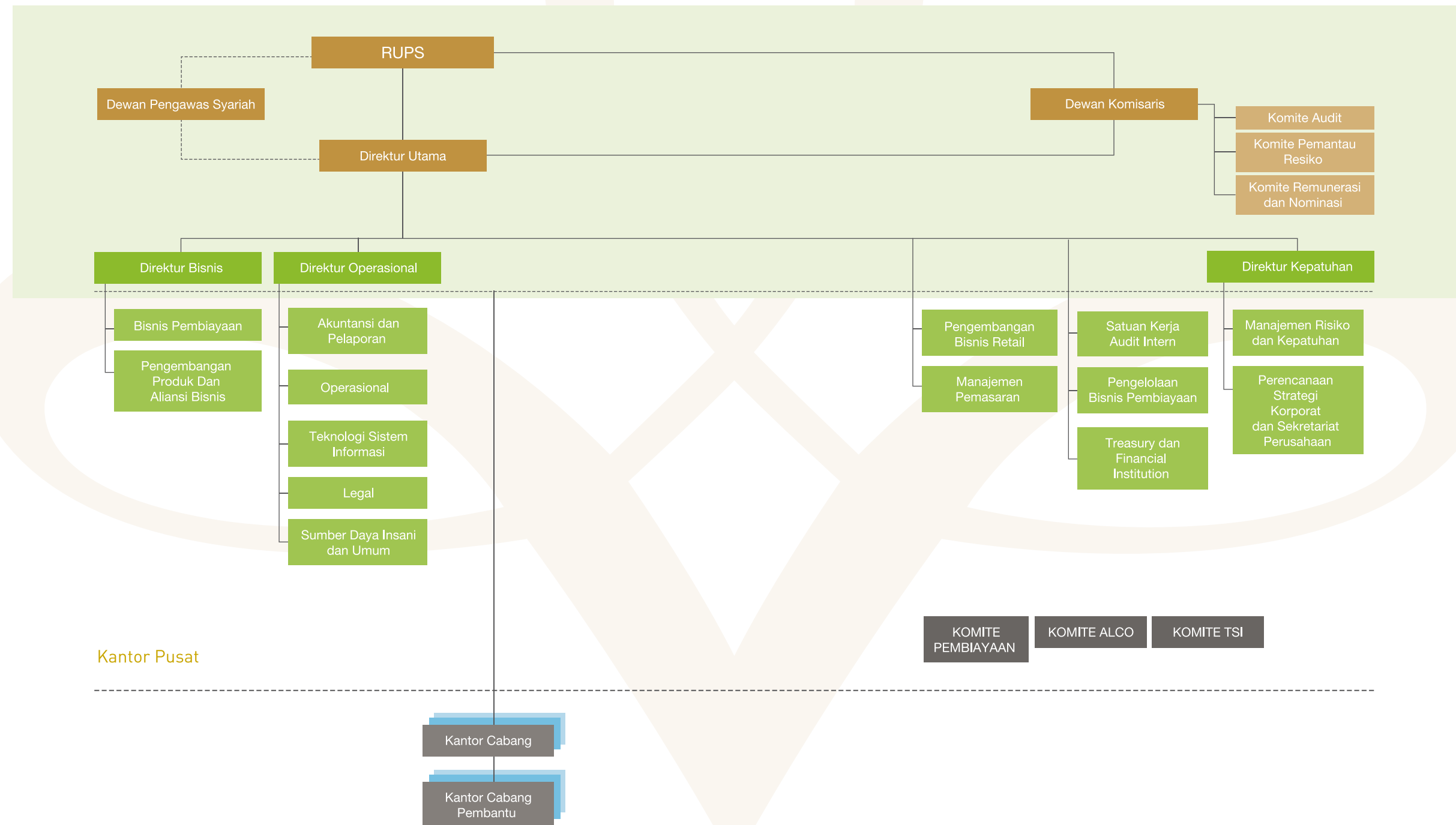
11.2. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,66 yang termasuk kategori Baik.
2. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDI, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
3. Di samping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.



STRUKTUR ORGANISASI





## PROFIL DEWAN KOMISARIS



**Pangulu Oloan Simorangkir**  
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi pada tanggal 29 Juni 1951. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosial Politik/Administrasi Niaga pada Universitas Diponegoro di Semarang pada tahun 1976 dan pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2002. Memulai karir di Bank Ekspor Impor Indonesia Tahun 1976 - 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Semarang. Tahun 1999 - 2007 Bekerja di PT Bank Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Profesional Staff yang mengevaluasi penyusunan dan pencapaian target cabang. Pada 30 November 2007 diangkat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Swaguna sampai dengan saat ini.



**H. Akhmad Supandi Wahyuseputra**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Kuningan pada tahun 1943. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Jayabaya di Jakarta tahun 1969. Berkariir pada PT. Bank Swaguna sejak tahun 1975-2009 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Operasional kemudian sebagai Komisaris. Pada tahun 2010 - 2012 menjabat sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Resiko PT. Bank Victoria Internasional, Tbk dan PT. Bank Victoria Syariah. Sejak bulan September 2012 menjabat sebagai Komisari Independen PT. Bank Victoria Syariah.



**R. Soehanda Djajakoesoema**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1956. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda pada Akademi Perbanas, Jakarta pada tahun 1980. Memulai karier di Citibank tahun 1980-1990 dengan jabatan terakhir sebagai Vice President - Treasury Operation Division. PT. Bank Universal tahun 1990 - 1997 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Urusan Operasional - Internasional. PT. Bank Akita tahun 1997 - 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SKAI. PT. Bank Victoria Internasional tahun 2010-2011 dengan jabatan terakhir Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Bergabung pada PT. Bank Victoria Syariah sejak 1 Desember 2011. Sejak September 2012 menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sampai Maret 2013. Pada tanggal 1 April 2013 diangkat menjadi Komisaris Independen melalui RUPS-LB.



## PROFIL DIREKSI



**Ani Murdiati**  
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Kudus pada tanggal 8 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Biologi pada Universitas Gajah Mada tahun 1988. Memulai karir di PT. Bank Jaya tahun 1997 - 1998 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang. PT. Bank Pelita tahun 1997 - 1998 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Utama. BPPN / IBRA tahun 1998 - 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Akunting dan Liquidation Team - Finance Dept. PT. Bank Mega tahun 1999 - 2001 dengan jabatan terakhir Kepala cabang. PT. Bank Tugu tahun 2001 - 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Bisnis. PT. Bank Mega Syariah tahun 2004 - 2012 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Retail Banking. Bergabung pada PT. Bank Victoria Syariah sejak 1 April 2013 sebagai Direktur Utama sesuai RUPSLB 1 April 2013.



**Sari Idayanti**  
Direktur Operational

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1966. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Jayabaya, Jakarta tahun 1990. Memulai karir di perbankan pada PT. Bank BIRA Tbk. Tahun 1989 - 1995 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Akunting dan Administrasi Keuangan. PT. Bank Victoria International Tbk tahun 1995 - 2007 dengan jabatan terakhir Kepala Divisi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan. Bergabung pada PT. Bank Victoria Syariah (dh Bank Swaguna) September 2007. April 2013 diangkat sebagai Direktur Operasional sesuai RUPSLB 1 April 2013.



**Djoko Nugroho**  
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten pada tanggal 7 Maret 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Matematika pada Institut Teknologi Bandung tahun 1986. Memulai karir sebagai Account Officer pada PT. Panin Bank tahun 1987 - 1989. PT. Bank Summa tahun 1990 - 1993 dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang. PT. Bank IFI tahun 1997 - 2003 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Unit Usaha Syariah. PT. Bank Victoria International Tbk tahun 2007. Bergabung dengan PT. Bank Victoria Syariah (dh Bank Swaguna) sejak 4 Februari 2008. Menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Sep 2012 sampai dengan Maret 2013. Pada tanggal 1 April 2013 diangkat sebagai Direktur Kepatuhan melalui RUPS-LB.



**Sutrisno Yulianto**  
Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 1973. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknologi Pertanian pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada tahun 1997 dan pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Gajah Mada di Yogyakarta tahun 2005. Memulai karir di PT. Bank Danamon, Tbk. tahun 1997 - 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President Commercial Agribusiness Unit. PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2007 - 2012 dengan jabatan terakhir sebagai SME Product Management Head. PT. Bank Victoria International, Tbk. tahun 2012 - 2013 dengan jabatan terakhir Staff Ahli Direktur Utama. Bergabung pada PT. Bank Victoria Syariah sejak 1 April 2013 sebagai Direktur Bisnis sesuai RUPSLB 1 April 2013.



## PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



**Prof. Dr. H. Hasanuddin A.F., M.A.**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Majalenka (Jawa Barat) pada tahun 1945. Memperoleh gelar sarjana syariah (S1) pada IAIN di Jakarta pada tahun 1974, S2 (MA) dan S3 (DR) di Universitas yang sama masing-masing pada tahun 1989 dan 1994.

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Victoria Syariah sejak tanggal 26 Maret 2010.



**Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.**  
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indoneisa, dilahirkan di Donggala (Sulawesi Tenggara) pada tahun 1945. Memperoleh gelar sarjana syariah (S1) pada Universitas Islam Al-Khairaat di Palu pada tahun 1975, S2 (MA) dan S3 (DR) di Universitas Al-Azhar Cairo, masing-masing pada tahun 1981 dan 1984.

Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Victoria Syariah melalui RUPS-LB tanggal 10 November 2011.



## PEJABAT EKSEKUTIF BANK



Dari kiri ke kanan

1. Nixon Lumban Tungkup
2. Adriansyah
3. Erik Pradityo
4. Emy Mei Indahati
5. Ida Yuningsih
6. Syafayuniveva
7. Nurlaelati

Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal  
Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan  
Kepala Divisi Sumber Daya Insani dan Umum  
Kepala Divisi Treasury dan Financial Institution  
Kepala Divisi Manajemen Pemasaran  
Kepala Divisi Teknologi dan Sistem Informasi  
Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

10. Mokh. Nuzuluddin Torada
9. Sri Mulyati
10. Eti Hidayati
11. Tofi Hartanto
12. Jimmy Johan Sukri
13. Suyat
14. Akhirudin Sumendeo

Kepala Divisi Perencanaan Strategik Korporat  
Dan Sekretariat Perusahaan  
Kepala Kantor Cabang Utama, Senayan, Jakarta  
Kepala Divisi Legal  
Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan  
Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Pembiayaan  
Kepala Divisi Operasional  
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Ritel



## PRODUK DAN LAYANAN

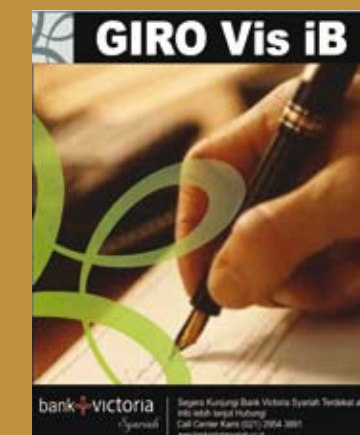


### PRODUK PENDANAAN



#### Deposito Vis iB

Deposito Inventasi Syariah berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan yang memberikan keuntungan dengan bagihasil yang kompetitif dan menarik.



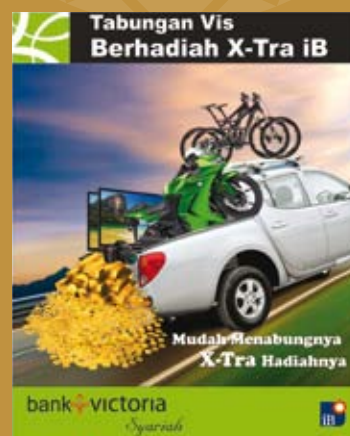
#### Giro iB - Wadiah (Titipan)

Merupakan Rekening Giro untuk nasabah perorangan maupun badan hukum, yang memiliki fasilitas cek dan Bilyet Giro.



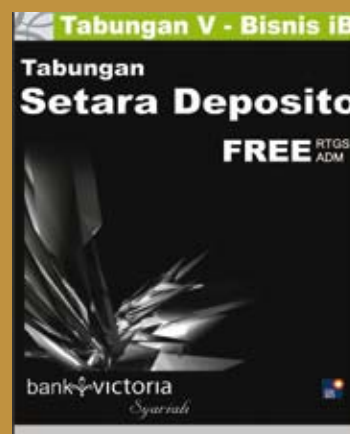
#### Giro Vis Prima iB

Merupakan Giro yang diperuntukkan bagi segmen perusahaan dengan akad *mudharabah* yang mendapat bagi hasil *tearing* sesuai dengan saldo harian nasabah.



#### Tabungan ViS Berhadiah X-Tra

Merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan dan perusahaan yang mendapat hadiah dimuka sesuai keinginan nasabah dengan penempatan nominal dana tertentu (diblokir) dan jangka waktu tertentu.



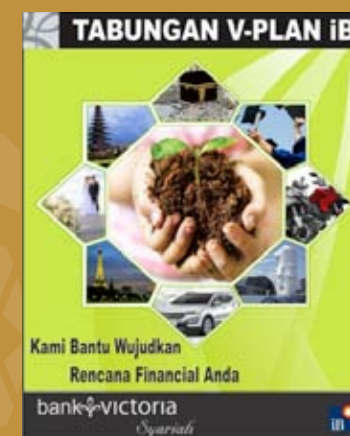
#### Tabungan V-Bisnis iB

Merupakan Jenis Tabungan dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil), diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan yang mendapatkan bagi hasil setara deposito.



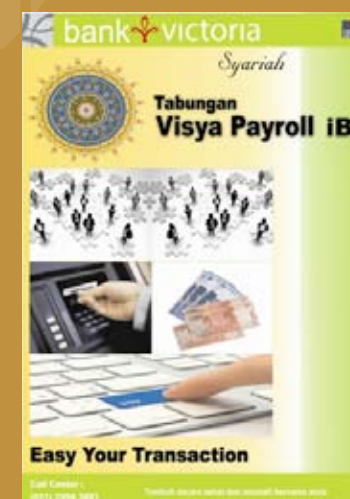
#### Tab. Visya iB

Simpanan dalam bentuk investasi syariah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan.



#### Tabungan V Plan iB

Merupakan Jenis Tabungan dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang penarikannya memiliki jangka waktu sesuai kesepakatan dengan nasabah.



#### Tabungan Visya Payroll

Merupakan jenis tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dan di peruntukkan untuk pembayaran *payroll* karyawan.



## PRODUK PEMBIAYAAN



### KMG ViS iB

Realisasikan impian Anda memiliki barang multiguna sesuai impian melalui KMG ViS iB, Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna.

KMG ViS iB adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan barang multiguna untuk kebutuhan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad *murabahah* dimana Bank Victoria Syariah menjual barang/benda kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.



### KPM ViS iB

Realisasikan impian Anda memiliki mobil idaman melalui KPM ViS iB, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Mobil.

KPM ViS iB adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil untuk kebutuhan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad *murabahah* dimana Bank Victoria Syariah menjual mobil kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.



### KPR ViS iB

Realisasikan impian Anda memiliki rumah melalui KPR ViS iB.

KPR ViS iB merupakan pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) untuk perorangan dengan akad *murabahah* dimana Bank Victoria Syariah membiayai pembelian rumah yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.



### MIKRO ViS iB

Pembiayaan MIKRO ViS iB adalah pembiayaan produktif dengan *plafond* minimum Rp25.000.000,00 (Duapuluh Lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.



### UKM ViS iB

Pembiayaan untuk investasi usaha dan atau pembiayaan modal kerja (pembiayaan kas, piutang usaha maupun persediaan) dengan pengembalian pembiayaan sesuai akad pembiayaan yang disepakati antara Bank dan Pelaku Usaha Kecil Menengah.



## KANTOR PUSAT & KANTOR PUSAT OPERASIONAL

Perkantoran Permata Senayan Blok E No.52,53,55  
Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Telp: (021) 57940940 Hunting  
Fax: (021) 57940941

## KANTOR CABANG & KANTOR CABANG PEMBANTU

### Cabang Bekasi

Bekasi Square No. 63  
Jl. A. Yani, Pekayon, Bekasi  
Telp: (021) 82434874-75, Fax: (021) 82434876

### Cabang Serang

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 152 A, Serang, Banten  
Telp: (0254) 227621, Fax: (0254) 227622

### Cabang Bandung

Jl. Gatot Soebroto No.3, Bandung, Jawa Barat  
Telp: (022) 87340303, Fax: (022) 87340311

### Cabang Cirebon

Cirebon Super Block, Blok GS / 5  
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26, Cirebon, Jawa Barat  
Telp: (021) 8291051-52, Fax: (0231) 8291053

### Cabang Tegal

Ruko Nirwana Square Blok A/12B, Tegal, Jawa Tengah  
Telp: (0283) 351024, 353875, Fax: (0283) 768081

### Cabang Denpasar

Ruko Tuban Plaza No. 45  
Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta - Badung, Bali  
Telp: (0361) 753531-32, Fax: (0361) 768081

### Capem Tebet

Grand Soepomo Jl. Prof.Dr.Soepomo SH, Blok A Lt.2 No.73  
Tebet, Jakarta Selatan  
Telp: (021) 83785567, Fax: (021) 83785568

### Capem Antapani

Ruko Harmoni Blok A/8  
Jl. Terusan Jakarta, Antapani, Bandung, Jawa Barat  
Telp: (022) 87240861, Fax: (022) 87240729

### Capem Pasar Induk Kramat Jati

Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D2/33  
Jl. Raya Bogor Km.17, Kramat Jati, Jakarta Timur  
Telp: (021) 87797573, Fax: (021) 87797574

### Capem Depok

Jl. Proklamasi Raya No.118, Sukmajaya  
Depok II Timur, Jawa Barat  
Telp: (021) 77831115, Fax: (021) 77831182

### Capem Tangerang

Ruko Modern Land Blok AR/23  
Jl. Jend. Sudirman, Cikokol, Tangerang, Banten  
Telp: (021) 55747698, Fax: (021) 55747699

### Capem Caringin

Ruko Pasar Caringin Blok A1/27  
Jl. Soekarno Hatta, Bandung  
Telp: (022) 5405861, Fax: (022) 5405862

### Capem Arjawinangun

Jl. By Pass No.4 Arjawinangun, Cirebon  
Telp: (0231) 8303502, Fax: (0231) 8303525

### Capem Brebes

Jl. A. Yani No.82 Brebes, Jawa Tengah  
Telp: (0283) 671271, Fax: (0283) 671426

### Capem Banjaran

Jl. Adiwerna No.7 Banjaran, Tegal  
Telp: (0283) 442203, Fax: (0283) 442204

### Capem Kuningan

Ruko Taman Kuningan Blok A No.11  
Kuningan, Jawa Barat  
Telp: (0232) 8882969, Fax: (0232) 879596

### Cabang Solo

Ruko Honggowongso Square Blok A/7  
Jl. Honggowongso, Solo  
Telp: (0271) 660832, Fax: (0271) 660932

### Capem Denpasar

Ruko Artha Luhur Blok Kav.4  
Jl. Diponegoro, Denpasar



